

	<b>News Title</b> : Kemendag: Target RI, Akhir 2023 Sudah Punya Acuan Harga Sawit Sendiri	
	<b>Media Name</b> : Akurat.co	<b>Journalist</b> : Putri Chandra
	<b>Publish Date</b> : 22 May 2023	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> :	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	<b>Ads Value</b> : 0
	<b>Section/Rubrication</b> : Ekonomi	<b>Topic</b> : Bursa CPO

## Kemendag: Target RI, Akhir 2023 Sudah Punya Acuan Harga Sawit Sendiri

*Herry Supriyatna*

~3 menit

**AKURAT.CO** Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan, Indonesia sudah memiliki acuan harga ekspor sawit sendiri mulai akhir tahun 2023. Kemendag menargetkan harga sawit dari acuan bursa sawit akan diluncurkan Juni mendatang.

"Setelah (bursa) kita luncurkan, harapannya akan terbentuk price discovery dari supply demand di bursa. Terbentuk mudah-mudahan paling lambat akhir tahun ini, price reference sudah bisa kita tetapkan karena itu diyakini (pelaku pasar)," kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, pelan lalu.

Selain itu, Indonesia sudah tak perlu lagi bergantung pada bursa sawit milik Malaysia seperti yang terjadi hingga saat ini.

"Saya belum katakan kami berhasil, tapi setidaknya ini satu langkah lagi," ujar Didid.

Dari pihak Bappebti, telah memastikan bursa komoditas sawit akan segera diluncurkan pada Juni 2023 seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang akan diterbitkan.

Didid menggarisbawahi bahwa bursa sawit yang akan dibentuk hanya sebagai acuan harga ekspor CPO dengan kode HS 15.111.000. Sedangkan untuk perdagangan dalam negeri tidak masuk ke dalam bursa tersebut.

Perlu diketahui bahwa kebijakan tersebut sudah dikonsultasikan bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Badan Kebijakan Perdagangan.

Tercatat saat ini, rata-rata produksi CPO nasional per tahun sekitar 50 juta ton. Didid menuturkan, volume yang diekspor setahun sekitar 30 juta ton.

"Dari 30 juta ton itu, yang masuk kode HS 15.111.000 itu hanya sekitar 9,75 persen atau mendekati 3 juta ton, inilah yang akan kami wajibkan untuk ekspornya nanti melalui bursa," kata Didid menambahkan.

Didid menegaskan, ekspor yang dilakukan bisa melalui bursa, jika setiap pelaku usaha tetap harus menjalani kewajiban domestic market obligation (DMO). Kebijakan dari Didid, untuk memastikan agar pasokan minyak sawit yang biasa digunakan sebagai minyak goreng dapat terpenuhi.

Didid juga menambahkan, harga yang terbentuk di dalam bursa merupakan harga murni sebelum pajak seperti bea keluar dan pungutan ekspor.

Untuk persoalan lembaga pengelola bursa, Didid mengatakan hal tersebut belum ditentukan hingga saat ini. Sejauh ini, Indonesia telah menjadi Bursa Berjangka Jakarta (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX).[]